POLICY BRIEF

VICRA VOICE FOR INCLUSIVENESS CLIMATE RESILIENCE ACTIONS

Peran Strategis Fiskal Daerah dalam Mendorong Pembangunan Berketahanan iklim yang inklusif

2024

Disusun oleh:

Fitri Wahyuningsih
Rapitalia
Meta Zahara
Febri Setiawan

YKWS YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH

PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO

Summary

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur mengungkapkan dominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor utama terhadap PDRB dari tahun 2018 hingga 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022. Sektor ini tetap diperkirakan akan prospektif hingga tahun 2027, menandakan pentingnya stabilitas sektor ini bagi perekonomian daerah. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan kontributor kedua terbesar pada 2022 diprediksi tidak akan prospektif dalam waktu dekat.

Analisis anggaran terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (GESI) menunjukkan adanya penurunan alokasi dari tahun 2022 ke 2023. Namun, di tingkat desa, peningkatan anggaran terlihat signifikan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelatihan yang tahan terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Kabupaten Lampung Timur meningkatkan alokasi anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Rekomendasi lainnya termasuk memperkuat investasi pada sektor-sektor prospektif dan berkelanjutan seperti pengadaan air, pengelolaan sampah, dan transportasi yang ramah lingkungan.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menguatkan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dengan meningkatkan kerjasama dan pendanaan dari berbagai pihak termasuk lembaga donor, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Diharapkan langkah-langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Dampak yang dihasilkan, seperti peningkatan suhu global, perubahan intensitas curah hujan, dan frekuensi bencana hidrometeorologi yang semakin tinggi, menuntut setiap negara untuk segera beradaptasi dan melakukan mitigasi. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek lingkungan hidup, tetapi juga sektor ekonomi, sosial, bahkan sektor pertanian.

Oleh Karena itu, di tingkat daerah penting untuk menerapkan kebijakan fiskal yang spesifik dalam mengatur penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan yang terkait dengan iklim. Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim karena dapat mengalokasikan sumber daya dan anggaran ke dalam program-program yang mendukung upaya penanganan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kabupaten Lampung Timur telah diidentifikasi sebagai salah satu daerah super prioritas aksi pembangunan berketahanan iklim, terutama dalam sektor pertanian, menurut hasil kajian Bappenas tahun 2021. Analisis menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk mengalami kerugian signifikan dalam sektor pertanian sebagai akibat dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Dalam konteks ini, penanganan dan pencegahan perubahan iklim menjadi prioritas utama, didukung oleh pengarus utamaan gender, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil langkah-langkah strategis melalui alokasi anggaran yang terukur. Dengan fokus pada sektor pertanian, daerah ini telah memprioritaskan kegiatan penanganan dan pencegahan perubahan iklim serta pengarus utamaan gender dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada urgensi keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada kesadaran akan potensi kerugian besar yang dapat dialami Kabupaten Lampung Timur akibat dampak perubahan iklim, sebagaimana telah dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2021. Dengan demikian, melalui analisis anggaran dan kebijakan fiskal yang cermat, Kabupaten Lampung Timur berupaya memastikan alokasi dana yang memadai untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sambil memastikan pengarus utamaan gender dalam setiap langkah pembangunan.

Konteks Wilayah

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 240C -340 C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur memiliki enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan ketinggian anatara 25,4-250meter serta dua buah sungai utama, yaitu Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Seputih. Persedian air di wilayah Kabupaten Lampung Timur pada dasarnya bergantung dari sungai-sungai utama dan anak-anak sungainya.

Berdasarkan data KabupatenLampung Timur Dalam Angka 2021, hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah pendudukKabupaten Lampung Timur adalah 1.110.340 jiwa denganpenduduk laki-laki 565.743jiwa dan pendudukwanita 544.597 jiwa.

Temuan

A. Hasil Analisa PDRB

Hasil analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur menunjukan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan Dan Perikananan memberikan kontribusi terbesar sejak 2018-2022. Pada tahun 2022, lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 33,73% dari total PDRB kabupaten Lampung Timur. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, lapangan usaha ini tercatat tetap menjadi sektor basis sejak 2018.

Hal ini menunjukan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan sumber utama pendapatan daerah dimana penurunan kontribusi akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, lapangan usaha tersebut diprediksi akan tetap prospektif untuk 5 tahun mendatang hingga 2027. Hal tersebut menunjukan bahwa lapangan usaha ini perlu menjadi perhatian sehingga dapat menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Selanjutnya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar kedua dengan jumlah kontribusi mencapai 21,14% pada

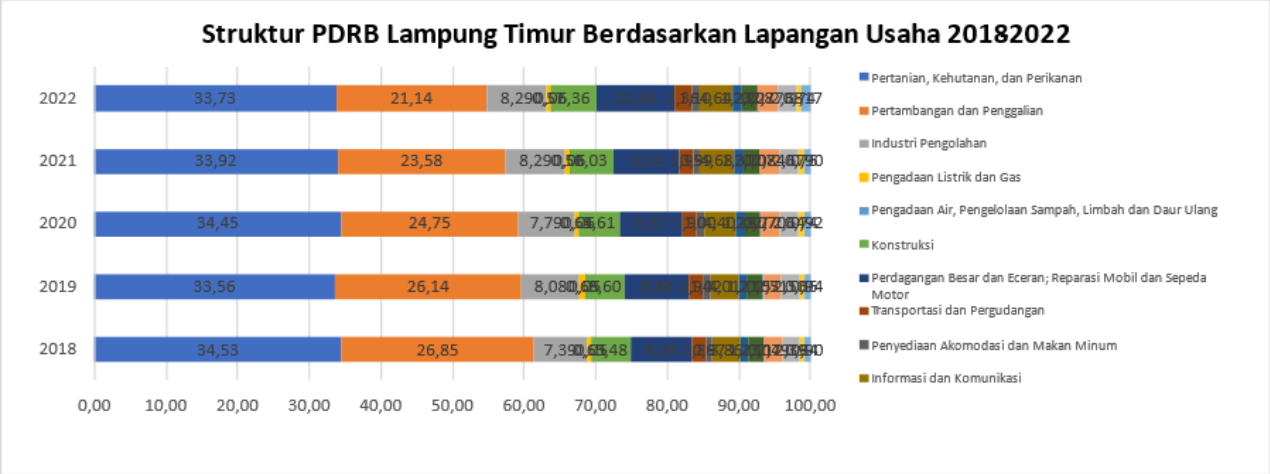

tahun 2022. Namun lapangan usaha ini diprediksi tidak prospektif untuk 5 tahun mendatang. Lapangan usaha lainnya yang menjadi basis dan diprediksi akan tetap prospek untuk 5 tahun mendatang adalah lapangan usaha pada Jasa Lainnya.

Selain itu, ada beberapa lapangan usaha yang saat ini tidak basis namun diprediksi akan prospektif dalam 5 tahun mendatang yakni:

(1). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
(2). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
(3). Transportasi dan Pergudangan.
(4). Informasi dan Komunikasi.
(5). Real Estate.
(6). Jasa Perusahaan.
(7). Jasa Pendidikan.
(8). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Beberapa lapangan usaha yang akan prospektif ini merupakan lapangan usaha yang erat kaitannya dengan upaya penanganan dan pencegahan perubahan iklim.

B. Analisa Penganggara Kegiatan Adaptasi & mitigasi perubahan Iklim dan Pengarusutamaan GESI

1. Tingkat Kabupaten

Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ber-perspektif iklim dan pengarusutamaan gender serta inklusi sosial (GESI) dapat dilihat dari komitmen anggran yang tertuang pada dokumen APBD. Budget tracking dilakukan untuk mengetahui alokasi anggaran untuk upaya pen-cegahan dan penanganan perubahan iklim (PI) dan GESI pada sektor pertanian berdasarkan APBD Kab Lampung Timur 2022 dan 2023. Analisa dilakukan pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas KPTPH, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, dan Bappeda.

Hasil analisa budget tracking menunjukan alokasi anggaran untuk PI dan GESI pada tahun 2022 sebesar 4,83% atau Rp114.287.669.076 dari total APBD Rp2.368.155.937.515.

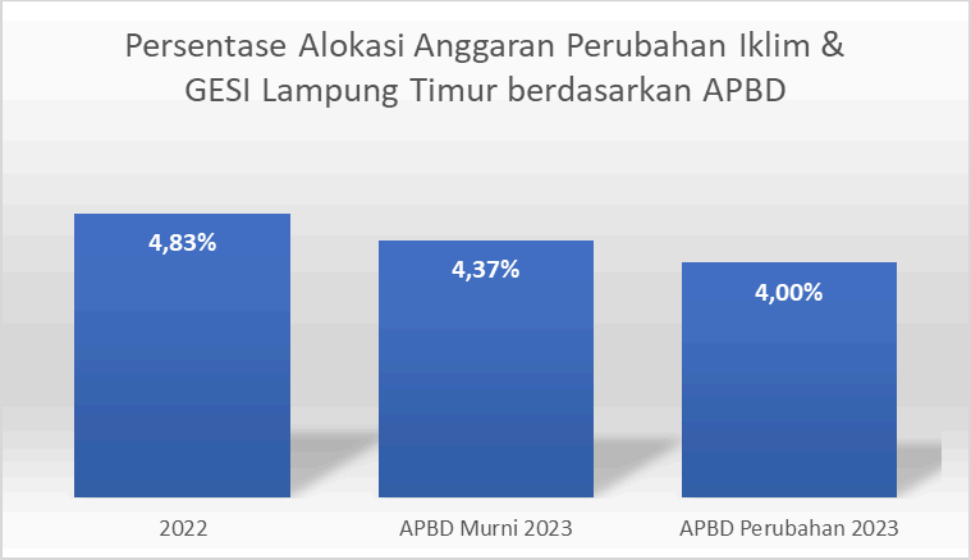

Sementara itu, alokasi pada tahun 2023 pada APBD murni sebesar 4,37% atau Rp98.289.704.720. dari total APBD. Alokasi tersebut terus turun pada APBD perubahan hingga menjadi 4,00% atau Rp93.657.277.287 dari total APBD Perubahan tahun 2023.

Penurunan alokasi anggaran ini diperkirakan karena adanya beberapa sub-kegiatan yang dilakukan pada 2022 namun tidak ada di tahun 2023. Contohnya pada Dinas PUPR menganggarkan untuk Penyusunan outlane plan pada kawasan genangan sebesar Rp350 juta dimana penyusunan outlane plan tersebut selesai pada tahun 2022, BPBD menganggarkan Rp184.059.200 untuk pengadaan dokumen kajian risiko bencana dimana pengadaan tersebut selesai pada tahun 2022.

selain itu Dinas KPTPH menganggarkan RP16.953.478.000 untuk Pendampingan penggunaan saranan pendukung pertanian dimana Pendampingan tersebut selesai Pada tahun 2022.

Beberapa item kegiatan pada APBD murni juga mengalami refokusing sehingga adanya penurunan anggaran atau bahkan hilang dari rencana penganggaran. Misalnya, Dinas LHKPP menganggarkan untuk Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota sebesar Rp160 juta pada APBD 2023 murni menjadi Rp10 juta pada APBD perubahan.

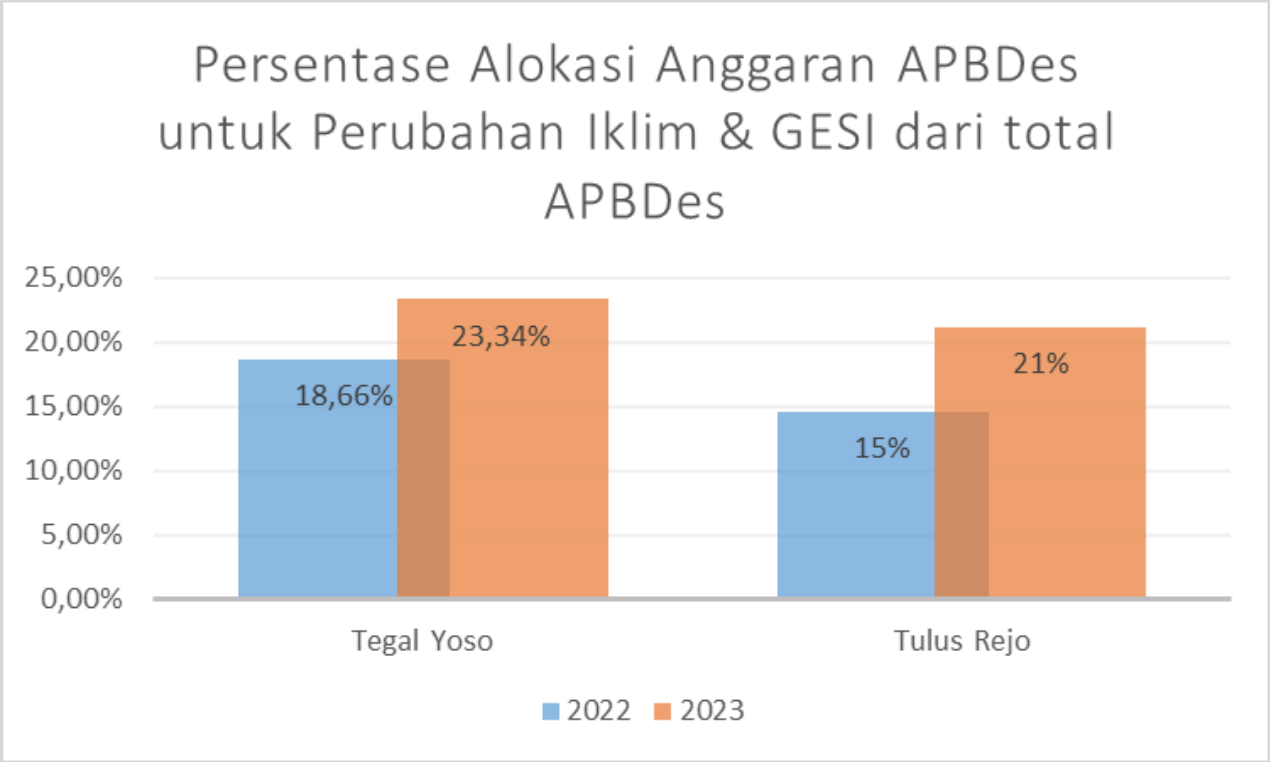

2. Tingkat Desa

Berbeda dengan komitmen anggaran di tingkat kabupaten, di tingkat desa, komitmen anggaran terhadap upaya pencegahan dan penaggulangan dampak perubahan iklim lebih terlihat. Misalnya yang terjadi di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo dan Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan yang merupakan desa lokus Program VICRA.

Di tingkat Desa, budget tracking dilakukan pada APBDes Tegal Yoso dan APBDes Tulus Rejo tahun 2022 dan 2023. Hasil budget tracking di Desa Tegal Yoso menunjukan adanya kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 23,34% atau Rp510.546.000 dibandingkan pada APBDes tahun 2022 yang alokasinya sebesar 18,6% atau Rp306.146.000 dari total APBDes dari total APBDes.

Alokasi anggaran di Desa Tegal Yoso ini didominasi kegiatan pengadaan dan pembangunan infrastruktur desa guna pembangunan berketahanan iklim.

Selain itu, hasil budget tracking di Desa Tulus Rejo juga menunjukan adanya kenaikan alokasi anggaran sebesar 21,18% atau Rp788.270.000 dari total APBDes dibandingkan tahun 2022 yang alokasinya sebesar 14,62% atau Rp. 500.270.000 dari total APBDes. Alokasi anggaran ini didominasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam rangka pembangunan berketahanan iklim.

Rekomendasi

Dari temuan di atas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Spesifik untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Meningkatkan alokasi anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan fokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Anggaran ini harus dirancang untuk mendukung pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, reboisasi, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu, alokasi ini juga harus mencakup program pengarusutamaan gender, memastikan perempuan, yang seringkali merupakan aktor kunci dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya, terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi aksi iklim.

2. Peningkatan Investasi pada Sektor Prospektif Berkelanjutan

Investasi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang, serta transportasi dan pergudangan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari adaptasi ekonomi terhadap krisis iklim. Ini mencakup pengembangan infrastruktur hijau dan biru yang tidak hanya mendukung ketahanan iklim tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap tahap kegiatan.

3. Kerjasama dan Pendanaan dari Pihak Ketiga

Mendorong kerjasama dengan lembaga donor, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menambah sumber pendanaan dan expertise dalam proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas lokal, transfer teknologi, dan implementasi praktek terbaik yang telah terbukti efektif di daerah lain.

Referensi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2021. “Buku 1: Daftar Lokasi & Ketahanan Iklim.” 1–84.